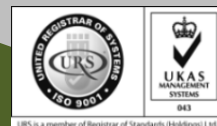




ANALISIS KINERJA PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



UKRS is a member of Registrar of Standards Holdings Ltd.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 2016**



**ANALISIS KINERJA
PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATALOG DALAM TERBITAN

Sudarwati

Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sudarwati.—Editor Ida Kintamani.—Jakarta: Pusat Data dan Statistik
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2016

x, 61p;28 cm

ISBN: 979-401-569-5

1. Kinerja Pendidikan
2. Misi Pendidikan
3. Meluas, Merata, Berkeadilan
4. Pembelajaran Bermutu
5. Provinsi Nusa Tenggara barat
6. Kemendikbud
7. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

ANALISIS KINERJA PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

Penyusun : Sudarwati, M.Si

Nara Sumber : Ir. Siti Sofiah, M.Sc

Dra. Ida Kintamani, M.Sc

Desain Sampul: Abdul Hakim, S.Kom

@2016 PDSPK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menyambut kesempatan emas bonus demografi Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia maka bonus demografi akan memberikan kemajuan yang cukup tinggi. Jika Indonesia tidak siap dan tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia maka bonus demografi justru akan menjadi bencana karena kebutuhan akan lapangan kerja untuk penduduk usia produktif sangat besar. Akan tetapi jika kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini maka akan mengurangi pengangguran, pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, meningkatnya daya saing bangsa dan Indonesia menjadi negara maju.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan termasuk didalamnya pendayagunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kajian ini diberi judul "Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat". Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur kinerja dalam dunia pendidikan pemerintah daerah Provinsi Nus Tenggara Barat.

Dalam menghitung kinerja pendidikan hanya digunakan Misi 2 dan Misi 3 yang akan dihitung dengan menggunakan penghitungan indikator pendidikan. M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Indikator pendidikan untuk misi ke-2 terdiri dari tiga jenis, yaitu akses meluas, akses merata, dan akses berkeadilan. Akses Meluas terdiri dari 6 indikator, yaitu 1) rasio siswa per kelas (R-S/K), 2) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK), 3) persentase perpustakaan (%Perpus), 4) persentase ruang UKS (%RUKS), 5) persentase tempat olahraga (%TOR), dan 6) persentase laboratorium (%Lab). Akses merata terdiri dari 5 indikator, yaitu 1) angka partisipasi murni (APM), 2) angka partisipasi kasar (APK), 3) tingkat pelayanan sekolah (TPS), 4) angka masukan murni (AMM) (SD) atau angka melanjutkan (AM) (SMP dan SM) dan 5) satuan biaya (SB). Akses berkeadilan terdiri dari 3 indikator, yaitu 1) perbedaan gender APK (PG APK), 2) indeks paritas gender APK (IPG APK), dan satuan biaya (SB). Dengan demikian, misi ke-2 menggunakan 13 indikator. Indikator pendidikan untuk misi ke-3 terdiri dari tiga jenis, yaitu mutu siswa, mutu guru, dan mutu prasarana. Mutu siswa terdiri dari 6 indikator, yaitu 1) persentase siswa baru SD asal PAUD/TK/RA/BA (%SB TK) (khusus SD), 2) angka mengulang (AU), 3) angka bertahan tingkat 5 (SD) atau angka bertahan (SMP dan SM), 4) angka lulusan (AL), 5) angka putus sekolah (APS), dan 6) rata-rata lama belajar (RLB). Mutu guru terdiri dari 3 indikator, yaitu (1) persentase guru layak (%GL), 2) persentase sertifikasi guru (%GS), dan 3) rasio siswa per guru (R-S/G). Mutu

prasarana terdiri dari 5 indikator, yaitu 1) persentase akreditasi A dan B (%SA-AB), 2) persentase ruang kelas baik (%Rkb), 3) persentase perpustakaan baik (%Perpusb), 4) persentase ruang UKS baik (%RUKSb), , dan 5) persentase laboratorium baik (%Lab) (khusus SMP dan SM). Dengan demikian, misi ke-3 menggunakan 14 indikator..

Berdasarkan analisis indikator didapatkan hasil bahwa IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 adalah 65,19 dimana nilai tertinggi adalah Kota Mataram dengan nilai 76,37. Rata-rata lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 mencapai angka 6,71 yang artinya mencapai kelas 6 SD. Misi Akses jenjang SD, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %TOR, %RUKS, %Perpus, %Lab dan AMM, sedangkan Misi Akses jenjang SMP, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %TOR, %RUKS, %Perpus, dan %Lab. Untuk Misi Akses jenjang SM, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %S-Swt, APK, APM, %R-UKS, dan %Lab. Pada Misi Mutu jenjang SD, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %Rkb, %SA-B, %GS, dan %SB-TK, Misi Mutu jenjang SMP, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %Rkb, %SA-B, dan %GS, sedangkan Misi Mutu jenjang SM, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %Rkb, %SA-B, dan %GS. Pada jenjang SMP, MTs dan SMPT ada empat kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas rata-rata nasional yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Kota Mataram bahkan memiliki nilai rata-rata mencapai 77.30. Untuk jenjang SMA jurusan IPA hanya Kota Mataram yang memiliki rata-rata nilai UN diatas rata-rata nasional, sedangkan untuk jurusan IPS tidak satupun kabupaten/kota yang memiliki rata-rata nilai UN-nya berada diatas nilai rata-rata nasional. Untuk jenjang SMK, hanya Kota Mataram yang memiliki rata-rata nilai UN-nya sedikit diatas nilai rata-rata nasional

Untuk meningkatkan Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat maka hendaknya pemerintah daerah provinsi perlu adanya pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. APK dan APM jenjang SM perlu ditingkatkan dengan membangun sekolah jauh supaya akses untuk sekolah menengah menjadi mudah bagi daerah-daerah yang belum terlayani sekolah menengah serta memberikan BOS daerah (selain BOS pemerintah pusat). Kelayakan guru di jenjang SD dan SMP perlu ditingkatkan dengan dilakukan banyak pelatihan guru dan memberikan beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu perlu adanya perbaikan sarana transportasi agar daerah-daerah yang belum terlayani bisa dilayani program pendidikan.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan data BPS Prov. Nusa Tenggara Barat tahun 2014 diketahui bahwa penduduk usia 10 tahun keatas Provinsi NTB rata-rata hanya mengenyam pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 28,12%. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, pada tahun ajaran 2014/2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sederajat 66,12%, APK SD/MI/ Sederajat 109,78 APK SMP/Mts/sederajat 107,18% dan APK SM 91,52%. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun mencapai 99,11%, APS 13-15 mencapai 97,27% dan APS 16-18 tahun baru mencapai 75,68%. Yang berarti masih banyak anak-anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat hanya mengenyam pendidikan dasar sampai tingkat sekolah menengah pertama. Oleh karena itu Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan termasuk didalamnya pendayagunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan Provinsi NTB. Kajian ini diberi judul “Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Sumber data pendidikan yang akan digunakan dalam analisis ini merupakan data dari dinas pendidikan kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi NTB yang kemudian digabung menjadi data untuk Provinsi NTB. Selain data pendidikan dari dinas kabupaten/ kota, digunakan juga data nonpendidikan yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. Berdasarkan indikator pendidikan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan maka dihitunglah kinerja pendidikan dengan menggunakan M2 yaitu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan M3 yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga buku ini dapat disusun. Saran masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2016
Kepala,

Dr. Ir. Bastari, MA
NIP. 196607301990011001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR PETA	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Indikator Pendidikan	13
2.2. Metodologi	18
BAB III Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	22
3.1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat	22
3.2. Kinerja Pendidikan.....	23
3.3. Nilai Indikator Pendidikan	23
3.4. Nilai Ujian Nasional Tahun Ajaran 2014/2015	23
BAB IV PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Standar untuk Melakukan Konversi Masing-masing Indikator	20
Tabel 3.1 IPM Metode Baru Provinsi NTB Tahun 2010-2015	22
Tabel 3.2 Komponen Pendidikan Penyusun IPM Metode Baru Provinsi NTB Tahun 2010-2015	23
Tabel 3.3 Data Pokok Pendidikan Provinsi NTB (Sekolah dan Madrasah)	24

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Indikator Akses yang Meluas (Rasio Pendidikan)	25
Grafik 3.2 Indikator Akses yang Meluas (Persentase Prasarana)	26
Grafik 3.3 Indikator Akses yang Merata (APK, APM, TPS dan AMM/AM)	29
Grafik 3.4 Indikator Akses yang Berkeadilan (PG APK, IPG APK dan %S-Swt)	32
Grafik 3.5 Indikator Mutu Siswa	34
Grafik 3.6 Indikator Mutu Guru	37
Grafik 3.7 Indikator Mutu Prasarana	39
Grafik 3.8 Indikator Jenjang SD Berdasarkan Misi Akses	41
Grafik 3.9 Indikator Jenjang SMP Berdasarkan Misi Akses	42
Grafik 3.10 Indikator Jenjang SM Berdasarkan Misi Akses	43
Grafik 3.11 Indikator Jenjang SD Berdasarkan Misi Mutu	44
Grafik 3.12 Indikator Jenjang SMP Berdasarkan Misi Mutu	45
Grafik 3.13 Indikator Jenjang SM Berdasarkan Misi Mutu	46
Grafik 3.14 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMP, MTs dan SMPT	48
Grafik 3.15 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMP, MTs dan SMPT per Mata Pelajaran	49
Grafik 3.16 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPA dan IPS	52
Grafik 3.17 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPA per Mata Pelajaran	53
Grafik 3.18 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPS per Mata Pelajaran	55

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.19 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMK Jurusan IPS per Mata Pelajaran	57
Grafik 3.20 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMK per Mata Pelajaran	58

DAFTAR PETA

	Halaman
Peta 3.1 Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMP, MTs dan SMPT	47
Peta 3.2 Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPA	50
Peta 3.3 Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPS	51
Peta 3.4 Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMK	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus di tahun 2020-2030. Bonus tersebut adalah *Bonus Demografi*, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial – ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Bonus Demografi di Indonesia dengan proporsi penduduk usia produktif sekitar 69 persen, sedangkan rasio angka ketergantungan mencapai titik terendah. Artinya jumlah angkatan kerja sangat besar namun menanggung beban kelompok usia anak dan lansia sangat kecil. Dengan demikian, bonus Demografi menjadi kesempatan jika usia produktif tidak hanya potensial tapi aktual, jika adanya ketersediaan lapangan kerja seimbang dengan pertumbuhan pencari kerja. Mereka yang memiliki keterampilan, pengetahuan, kesehatan serta etos kerja akan mampu mengelola produktivitas sehingga terbentuk tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi selanjutnya. Bonus Demografi akan menjadi pilar peningkatan produktivitas suatu negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif. Di Indonesia, fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun yang lalu, yang dipercepat oleh keberhasilan kita dalam menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas di bidang

pendidikan dan kesehatan serta suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang.

Ketika angka fertilitas menurun, pertumbuhan per kapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia. Pada saat yang sama, jumlah anak yang sedikit membuka peluang perempuan untuk masuk ke pasar kerja yang akan meningkatkan produktifitas keluarga. Dari struktur penduduk yang ada, rasio ketergantungan ini mulai menurun sejak tahun 1990 dan puncaknya akan dicapai sekitar tahun 2020, dimana rasio ketergantungan ini ada pada angka terendah yaitu 43,7. Angka ini akan mulai naik dengan cepat pada tahun-tahun setelah tahun 2030, dengan makin bertambahnya penduduk lansia akibat makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia karena makin tinggi tingkat kesejahteraan mereka.

Bonus demografi selain menjadi berkah juga bisa menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di tahun 2020-2030? Kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional? Kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri. Paling banter, pekerja Indonesia di luar negeri adalah menjadi pembantu. Untuk tingkat dalam negeri sekali pun, pekerja Indonesia masih kalah dengan pekerja asing. Hal ini ditandai dari banyaknya

peluang kerja dan posisi strategis yang malah ditempati tenaga kerja asing. Usia produktif ini akan menjadi boomerang ketika usia produktif tidak dibekali kemampuan untuk bisa bertahan hidup dan mengembangkan diri yang pada akhirnya hanya akan menjadi beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan terciptanya angka pengangguran yang tinggi.

Bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menyambut kesempatan emas bonus demografi Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia maka bonus demografi akan memberikan kemajuan yang cukup tinggi. Jika Indonesia tidak siap dan tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia maka bonus demografi justru akan menjadi bencana karena kebutuhan akan lapangan kerja untuk penduduk usia produktif sangat besar. Akan tetapi jika kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini maka akan mengurangi pengangguran, pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, meningkatnya daya saing bangsa dan Indonesia menjadi negara maju.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia salah satunya dengan menerapkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep "pendidikan dasar untuk semua" (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama dalam Bab III pasal 4 ayat 1 juga menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV, Pasal 5 Ayat 1 juga dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu pengembangan kualitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian dari program-program pembangunan di Indonesia terkait erat dengan komitmen internasional dalam mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah dicanangkan sejak tahun 2000 melalui deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah berakhir pada tahun 2015 lalu yang kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam kehidupan masyarakat, pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan rata-rata lama sekolah digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk dari suatu masyarakat, maka diharapkan akan semakin baik juga kualitas sumberdaya manusianya. Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap individu disamping juga dapat digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sangatlah penting.

Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ini tercermin dari masih banyaknya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar yang kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, serta distribusi guru yang belum merata. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan akan mengakibatkan keterpurukan negara ini. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya pemerintah pusat maupun daerah bekerjasama untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Reformasi desentralisasi pada awal tahun 2000 telah menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan-layanan dasar. Hal ini membuat pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akses ke Pendidikan Dasar menjadi prioritas utama

pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Indonesia di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Perkembangan pendidikan anak yang ditandai oleh peningkatan kualitas pendidikan sangat penting artinya dalam penuntasan wajib belajar. Dalam rangka Wajib Belajar, diupayakan bagi setiap anak usia sekolah untuk menempuh tingkat pendidikan dasar secara tuntas. Dengan melalui jenjang pendidikan tersebut diharapkan anak usia sekolah pendidikan dasar yang merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing terhadap sumber daya dari negara lain. Salah satu upaya dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermutu adalah dengan meminimalkan jumlah anak putus sekolah karena putus sekolah akan dapat menghambat keberlanjutan siswa dalam meningkatkan jenjang pendidikannya.

Pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) secara nasional APK Sekolah Menengah dan sederajat pada tahun 2014 baru mencapai 75.53% dan APM nya baru mencapai 57.15%. Hal ini berarti bahwa masih banyak anak-anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Bagaimana rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas akan meningkat jika masih banyak anak-anak usia diatas 15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi. Bagaimana

kualifikasi tenaga kerja Indonesia akan meningkat jika anak-anak usia sekolah sudah tidak bersekolah lagi. Dunia kerja di Indonesia kan didominasi oleh tenaga kerja yang berkualifikasi rendah jika anak-anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah justru masuk ke dunia kerja. Untuk itu pemerintah perlu menjamin akses pendidikan menengah seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Berdasarkan data Susenas 2015 anak usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah sebesar 28,25%, yang masih bersekolah sebesar 70,91% dan yang tidak pernah sekolah 0,84%. Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS penduduk usia 7-24 tahun sebesar 79.883.100 jiwa. Jika masih ada 0,84% yang tidak pernah bersekolah berarti secara nominal masih ada sekitar 671.018 anak usia 7-24 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini senada dengan masih banyaknya penduduk usia 15 keatas yang tidak memiliki ijazah sebesar 18,52%, yang memiliki ijazah SD/MI sebesar 27,79%, yang memiliki ijazah SMP/Mts sebesar 21,44%, yang memiliki ijazah SMA/MA sebesar 18,80%, yang memiliki ijazah SMK/MAK sebesar 5,50%, yang memiliki ijazah D1/D2 sebesar 0,72%, yang memiliki ijazah akademi/D3 sebesar 1,61% dan yang memiliki ijazah D4/S1/S2/S3 sebesar 5,62%. Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD/MI.

Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah meluncurkan paket reformasi pendidikan menyeluruh yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung jawab pendidikan dasar kepada sekolah-sekolah dan pemerintah di daerah. Reformasi tersebut, bersama-sama

dengan peningkatan investasi negara dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghasilkan peningkatan akses pendidikan yang signifikan terutama bagi anak-anak yang paling miskin. Namun peningkatan yang dicapai dalam hal prestasi belajar tidaklah menggembirakan dan anak-anak masih meninggalkan sekolah dengan tingkat keterampilan yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh pasar tenaga kerja. Sama seperti sistem pendidikan lainnya di seluruh dunia, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah masih terus menjadi tantangan mendasar. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dengan baik dan berkualitas ternyata sangat beragam tingkatannya di seluruh Indonesia. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dari pembentukan modal manusia semakin mendapat perhatian dari peneliti dengan kajian empiris berbagai berbagai negara dan antarnegara. Tapi penelitian untuk wilayah regional dalam suatu negara masih relatif lebih sedikit.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan data BPS Nusa Tenggara Barat tahun 2014 diketahui bahwa penduduk usia 10 tahun keatas Provinsi NTB rata-rata hanya mengenyam pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 28,12%. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, pada tahun ajaran 2014/2015 Prov. Nusa Tenggara Barat memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sederajat 66,12%, APK SD/MI/ Sederajat 109,78 APK SMP/Mts/sederajat 107,18% dan APK SM 91,52%. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 Prov. Nusa Tenggara Barat memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun mencapai 99,11%, APS 13-15 mencapai 97,27% dan APS 16-18 tahun baru mencapai 75,68%. Yang berarti masih banyak anak-anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat hanya mengenyam pendidikan dasar sampai tingkat sekolah menengah pertama. Pada tahun 2014 APS 7-12 tahun anak laki-laki di Provinsi NTB sebesar 98,76% dan anak perempuan sebesar 99,52%. APS 13-15 tahun anak laki-laki sebesar 97,03% dan anak perempuan sebesar 97,51%, sedangkan APS 16-18 tahun anak laki-laki sebesar 76,03% dan anak perempuan sebesar 75,35%. Hal ini berarti bahwa keinginan bersekolah untuk anak perempuan usia 16-18 tahun lebih besar daripada anak laki-laki. Apabila memperhatikan kondisi APS menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa kondisi APS di masing-masing kelompok umur untuk penduduk perempuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan APS laki-laki yaitu di kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sedangkan di kelompok 16-18 tahun partisipasi sekolah perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di NTB memiliki kecenderungan untuk tidak bersekolah lebih tinggi daripada laki-laki di usia menjelang dewasa. Di antara penyebabnya adalah bahwa di usia tersebut masih banyak ditemukan perempuan yang melakukan pernikahan dini sehingga mereka tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB pada tahun 2014 sebesar 64.31 yang berada

pada urutan 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Rata-rata lama sekolah Provinsi NTB pada tahun 2014 baru mencapai angka 6,67 yang artinya baru mencapai kelas 6 SD. Komponen penyusun IPM dengan metode baru terdiri dari 3 yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang terdiri dari 4 variabel yaitu angka harapan hidup yang mewakili komponen kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili komponen pendidikan dan pengeluaran mewakili komponen ekonomi. Ada 2 variabel yang mewakili komponen pendidikan. Hal ini berarti bahwa dari sisi pendidikan sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan termasuk didalamnya pendayagunaan data merasa perlu melakukan suatu kajian tentang kinerja pendidikan provinsi Nusa Tenggara Barat. Kajian ini diberi judul “Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

1.3. Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur kinerja dalam dunia pendidikan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Renstra Kemendikbud 2015-2019 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini bermakna bahwa terwujudnya tujuh elemen ekosistem dimana ditekankan bahwa peran pelaku dalam suatu ekosistem sangat penting.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah

1. Sekolah yang kondusif. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung untuk terciptanya sekolah yang kondusif. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.
2. Guru sebagai penyemangat. Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Seorang guru juga harus mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.
3. Orangtua yang terlibat aktif. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.
4. Masyarakat yang sangat peduli. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Karena

keterbatasan sumber daya pemerintah maka diperlukan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Bentuk partisipasi dan kepedulian ini dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah.

5. Industri yang berperan penting. Peran industri dapat ditunjukkan berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan.
6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar. Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan.
7. Pemerintah yang berperan optimal. Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar daerah.

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkanlah 5 (lima) Misi Kemendikbud sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.

3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

2.1 Indikator Pendidikan

Dalam menghitung kinerja pendidikan hanya digunakan Misi ke-2 dan 3 dengan menggunakan penghitungan indikator pendidikan. Indikator pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan di bidang pendidikan (Ida K, 2013). Indikator-indikator yang digunakan dalam menghitung kinerja pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Rasio siswa per kelas ($R-S/K$),
Jika nilai ini melebihi dari standar yang ditentukan berarti akan membuat proses belajar mengajar tidak efisien, tetapi jika nilai indikator ini kurang dari standar yang ditentukan maka berarti proses belajar mengajar tidak efektif.
2. Rasio kelas per ruang kelas ($R-K/RK$)
Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang tidak digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki.

3. Persentase perpustakaan (%Perpus).
Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
4. Persentase ruang UKS (%RUKS),
Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang UKS sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
5. Persentase ruang komputer (%Rkom),
Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang komputer sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik
6. Persentase laboratorium (%Lab), dan
Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.
7. Persentase ruang olahraga (%ROR).
Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki ruang olahraga sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik
8. Tingkat pelayanan sekolah (TPS). Makin tinggi TPS berarti makin kecil kesempatan yang diberikan oleh sekolah dalam melayani penduduk usia sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin sulit dijangkau. Sebaliknya, makin kecil TPS berarti makin besar kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin mudah dijangkau.

9 Daerah terjangkau (DT).

Makin tinggi DT berarti makin tidak terjangkau oleh siswa. Artinya, sekolah makin tidak bisa dijangkau. Sebaliknya, makin kecil DT berarti sekolah makin mudah dijangkau oleh siswa.

10. Satuan biaya (SB).

Makin besar satuan biaya pendidikan berarti semakin baik karena berarti pemerintah daerah semakin perhatian dalam memberikan dana untuk pendidikan.

11. Persentase siswa baru SD asal PAUD/TK/RA/BA (%SB-TK),

Idealnya adalah 100 persen, artinya semua siswa baru SD berasal dari tamatan PAUD/TK/RA/BA karena berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa siswa yang berasal dari PAUD/TK/BA/RA memiliki kemampuan yang lebih baik daripada yang tidak masuk PAUD/TK/RA/BA (rumah tangga)

12. Persentase guru layak (%GL),

Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.

13. Rasio siswa per guru (R-S/G),

Jika nilainya lebih dari standar berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah. Jika nilainya kurang dari standar berarti terjadi kelebihan guru di wilayah tersebut.

14. Angka lulusan (AL),

Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semuanya. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.

15. Angka mengulang (AU),
Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.
16. Angka putus sekolah (APS),
Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.
17. Persentase ruang kelas baik (%RKb),
Idealnya adalah 100 persen berarti semua perpustakaan dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah
18. Persentase perpustakaan baik (%Perpusb),
Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang perpustakaan dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.
19. Persentase ruang UKS baik (%RUKSb),
Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang UKS dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.
20. Persentase ruang komputer baik (%Rkomb),
Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang komputer dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.
21. Persentase laboratorium baik (%Labbb).
Idealnya adalah 100 persen berarti semua sekolah mempunyai ruang laboratorium dan semuanya dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

22. Perbedaan gender (PG),

Idealnya adalah 0 persen berarti tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin buruk, sebaliknya makin rendah berarti makin baik. Bila angkanya minus berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya tak minus berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah -, 0, dan +.

23. Indeks paritas gender (IPG),

Idealnya adalah 1 berarti tidak ada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila angkanya lebih dari 1 berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya kurang dari 1 berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah <1, 1, dan >1.

24. Persentase siswa swasta (%S-Swt).

Makin tinggi nilainya berarti makin besar partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa. Belum ada ketentuan berapa nilai idealnya.

25. Angka Partisipasi Murni (APM).

Idealnya bernilai 100 persen berarti semua siswa bersekolah sesuai usia dan jenjang pendidikan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Bila nilai APM lebih besar dari 100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu karena lokasi sekolah di daerah kota atau daerah perbatasan.

26. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan.

27. Angka Masukan Murni (AMM) khusus SD dan Angka Melanjutkan (AM) untuk SMP dan SM,

Untuk AMM idealnya adalah 100 persen. Makin tinggi AMM berarti makin banyak siswa masuk sekolah yang sesuai dengan usia resmi di suatu daerah.

Untuk AM idealnya adalah 100 persen yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi angkanya makin baik. Bila angkanya lebih dari 100 persen karena ada siswa baru tingkat I yang berasal dari daerah lainnya.

28. Angka bertahan 5 (AB5)/angka bertahan (AB),

Untuk AB5, makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di Sekolah Dasar sampai tingkat 5. Untuk AB idealnya adalah 100 persen yang berarti semua siswa dapat bertahan sampai lulus dan tidak ada yang mengulang. Makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di sekolah sampai lulus.

29. Rata-rata Lama Belajar (RLB).

Idealnya adalah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM yang berarti semua siswa lulus tepat waktu dan tak ada yang mengulang.

2.2 Metodologi

Sumber data pendidikan yang akan digunakan dalam analisis ini merupakan data dari dinas pendidikan kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari dapodik, serta data nonpendidikan yang bersumber pada Badan Pusat Statistik. Dalam analisis kinerja pendidikan ini, setelah nilai-nilai indikator didapat kemudian nilainya distandarkan dengan standar indikator karena satuannya tidak sama.

Menyesuaikan dengan Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019 maka dalam mengukur kinerja pendidikan digunakan Indikator pendidikan yang disesuaikan Misi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Indikator pendidikan untuk misi ke-2 terdiri dari tiga jenis, yaitu akses meluas, akses merata, dan akses berkeadilan. Akses merata terdiri dari 6 indikator, yaitu 1) rasio siswa per kelas (R-S/K), 2) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK), 3) persentase perpustakaan (%Perpus), 4) persentase ruang UKS (%RUKS), 5) persentase tempat olahraga (%TOR), dan 6) persentase laboratorium (%Lab). Akses meluas terdiri dari 4 indikator, yaitu 1) angka partisipasi murni (APM), 2) angka partisipasi kasar (APK), 3) tingkat pelayanan sekolah (TPS), dan 4) satuan biaya (SB). Akses berkeadilan terdiri dari 3 indikator, yaitu 1) perbedaan gender APK (PG APK), 2) indeks paritas gender APK (IPG APK), dan satuan biaya (SB). Dengan demikian, misi ke-2 menggunakan 13 indikator.

Indikator pendidikan untuk misi ke-3 terdiri dari tiga jenis, yaitu mutu siswa, mutu guru, dan mutu prasarana. Mutu siswa terdiri dari 6

indikator, yaitu 1) persentase siswa baru SD asal TK (%SB TK) (khusus SD), 2) angka mengulang (AU), 3) angka bertahan tingkat 5 (SD) atau angka bertahan (SMP dan SM), 4) angka lulusan (AL), 5) angka putus sekolah (APS), dan 6) rata-rata lama belajar (RLB). Mutu guru terdiri dari 3 indikator, yaitu (1) persentase guru layak (%GL), 2) persentase sertifikasi guru (%GS), dan 3) rasio siswa per guru (R-S/G). Mutu prasarana terdiri dari 5 indikator, yaitu 1) persentase akreditasi A dan B (%SA-AB), 2) persentase ruang kelas baik (%RKB), 3) persentase perpustakaan baik (%Perpusb), 4) persentase ruang UKS baik (%RUKSb), dan 5) persentase laboratorium baik (%Lab). Dengan demikian, misi ke-3 menggunakan 14 indikator. Karena data satuan biaya yang merupakan anggaran dari pemerintah daerah untuk program pendidikan tidak ada datanya maka indikator ini dikeluarkan dari perhitungan untuk menentukan indikator akses yang meluas.

Dalam analisis kinerja pendidikan ini, setelah nilai-nilai indikator didapat kemudian nilainya distandarkan dengan standar indikator karena satuannya tidak sama. Standar indikator yang digunakan adalah:

Misi	No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM Dikdasmen	Penjelasan
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Akses yang Meluas						
	1	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	Siswa	32	36	36	- Permendikbud 23/2013, 24/2007 (SMA) & 40/2008 (SMK)
	2	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	Kelas	1	1	1	1 Ideal
	3	Persentase Perpustakaan (%Perpus)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	4	Persentase Ruang UKS (%RUKS)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	5	Persentase Tempat Olahraga (%TOR)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	6	Persentase Laboratorium (%Lab)	Persentase	-	100	100	100 Ideal
	Akses yang Merata						
	7	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	8	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	9	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	Siswa	53	76	68	61 Angka nasional 2015/2016
	10	Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM)	Persentase	50	100	100	100 Ideal
	11	Satuan Biaya (SB)	Rupiah	1000000	1250000	1500000	- 80% dr BOS 2015
	Akses yang Berkeadilan						
12	Perbedaan Gender APK (PG APK)	Persentase	0	0	0	0 Ideal	
13	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	Indeks	1	1	1	1 Ideal	
14	% Siswa Swasta (% S-Swt)	Persentase	10	25	50	- Ideal	
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	Mutu dari segi Siswa						
	1	Persentase Siswa Baru TK (%SB TK)	Persentase	100	-	-	- Ideal
	2	Angka Mengulang (AU)	Persentase	0	0	0	0 Ideal
	3	Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM)	Persentase	95	100	100	- Ideal
	4	Angka Lulusan (AL)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	5	Angka Putus Sekolah (APS)	Persentase	0	0	0	0 Ideal
	6	Rata2 Lama Belajar (RLB)	Tahun	6	3	3	- Ideal
	Mutu dari segi Guru						
	7	Persentase Guru Layak (% GL)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	8	Persentase Guru Sertifikasi (%GS)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	9	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	Siswa	16	15	12	- Angka nasional 2015/2016
	Mutu dari segi Prasarana						
	10	Persentase Sekolah Akreditasi A & B (%SA-AB)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	11	Persentase Ruang Kelas baik (%RKb)	Persentase	100	100	100	100 Ideal
12	Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb)	Persentase	100	100	100	100 Ideal	
13	Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb)	Persentase	100	100	100	100 Ideal	
14	Persentase Laboratorium baik (%Labb)	Persentase	100	100	100	100 Ideal	

BAB III

ANALISIS KINERJA PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tabel 3.1 IPM Metode Baru Provinsi NTB Tahun 2010-2015

No	Kab/Kota	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran	IPM
1	Lombok Barat	65,10	12,66	5,69	10.558	64,62
2	Lombok Tengah	64,75	12,81	5,54	8.846	62,74
3	Lombok Timur	64,44	13,12	6,15	8.100	62,83
4	Sumbawa	66,02	12,27	7,52	7.743	63,91
5	Dompu	65,36	13,27	7,83	7.479	64,56
6	Bima	64,86	13,11	7,36	7.371	63,48
7	Sumbawa Barat	66,35	13,57	7,68	10.234	68,38
8	Lombok Utara	65,59	12,34	5,22	7.940	61,15
9	Kota Mataram	70,43	15,28	9,05	13.399	76,37
10	Kota Bima	69,12	14,95	9,96	9.594	72,99
	NTB	65,38	13,04	6,71	9.241	65,19

Sumber : BPS, 2016

Pada tahun 2015 terdapat 8 provinsi di Indonesia yang telah mencapai kategori “Tinggi” dalam pembangunan manusia yakni Provinsi Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori menengah bersama 24 provinsi lain. Terdapat satu provinsi yang masih di level “Rendah”, yaitu Provinsi Papua

Tabel 3.2 Komponen Penyusun IPM Prov. NTB , 2015

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Lombok Barat	60,61	61,64	62,24	62,91	63,52	64,62
2	Lombok Tengah	58,97	59,77	60,57	61,25	61,88	62,74
3	Lombok Timur	58,86	59,84	60,73	61,43	62,07	62,83
4	Sumbawa	60,93	61,65	61,96	62,44	62,88	63,91
5	Dompu	61,44	61,84	62,60	63,16	63,53	64,56
6	Bima	60,19	60,62	61,05	62,08	62,61	63,48
7	Sumbawa Barat	65,42	65,94	66,45	66,86	67,19	68,38
10	Lombok Utara	56,13	57,13	58,19	59,20	60,17	61,15
8	Kota Mataram	72,47	73,50	74,22	75,22	75,93	76,37
9	Kota Bima	79,11	70,57	71,21	71,72	72,23	72,99
	NTB	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19

Sumber : BPS, 2016

Pada tahun 2015 IPM Provinsi NTB sebesar 65,19 dimana komponen pendidikan yang mendukung adalah harapan lama sekolah mencapai 13,04 sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2015 baru mencapai 6,71 yang berarti baru kelas 6 SD. Perlu usaha yang cukup keras supaya penduduk NTB bisa mencapai pendidikan yang setara dengan lulusan menengah mengingat harapan lama sekolah bagi penduduk NTB saat ini adalah 13,04 yang berarti sudah lulus jenjang SM.

3.2. Kinerja Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan di Provinsi NTB akan diuraikan berdasarkan Misi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019.

Gambaran umum pendidikan Provinsi NTB terlihat pada tabel 3.3 yang merupakan data pokok pendidikan Provinsi NTB. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa siswa SD merupakan jumlah terbesar yaitu 59,72%. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud pada tahun 2015 APK jenjang SD sebesar 107,99%, jenjang SMP 105,57% dan jenjang SM 85,37%.

Melihat data tersebut berarti masih banyak anak usia sekolah jenjang SM masih banyak yang belum bersekolah. Walaupun jumlah sekolah SM sudah mencapai 1.050 sekolah, akan tetapi ternyata belum mencukupi untuk menampung siswa yang mau bersekolah di jenjang SM. Melihat data pada tabel 3.3 terlihat bahwa layanan pendidikan jenjang pendidikan dasar jauh lebih besar daripada jenjang menengah. Hal ini terlihat bahwa jumlah Sekolah Menengah (SM) hanya mencapai 15,61% dari total sekolah pendidikan dasar dan menengah.

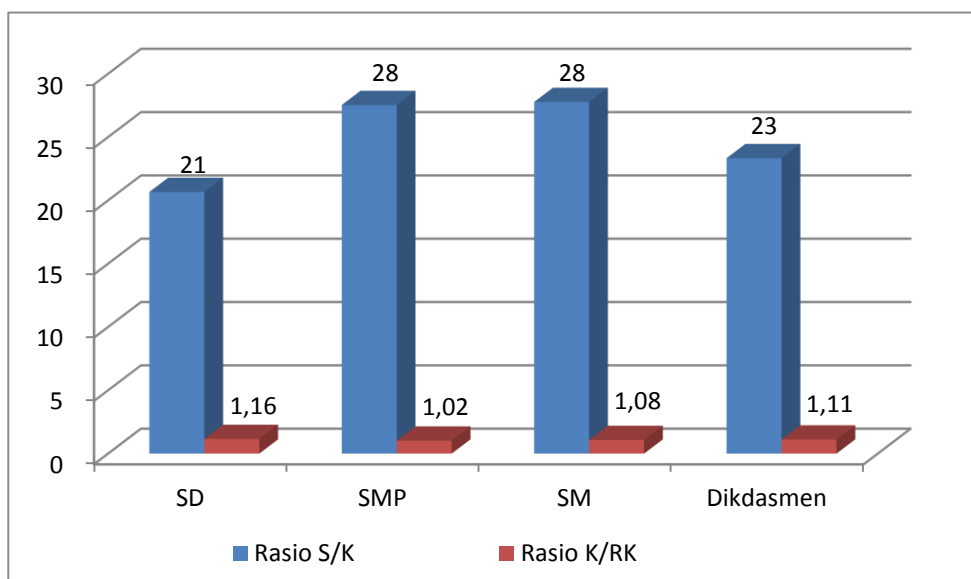
Tabel 3.3. Data Pokok Pendidikan Provinsi NTB (Sekolah dan Madrasah)

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Sekolah	4.018	1.660	1.050	6.728
2	Siswa	611.815	285.904	220.716	1.118.435
3	Siswa Baru	103.320	85.961	71.256	260.537
4	Guru	56.135	33.359	23.179	112.673
5	Lulusan	97.652	87.810	56.892	242.354
6	Rombongan Belajar	29.606	10.385	7.948	47.939
7	Ruang Kelas	25.522	10.135	7.381	43.038

3.2.1 Akses Meluas

Indikator yang menyusun nilai kinerja pendidikan pada akses yang merata ada 6 indikator yaitu Rasio Siswa per Kelas (R-S/K), Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK), Persentase Perpustakaan (%Perpus), Persentase Ruang UKS (%RUKS), Persentase Tempat Olahraga (%TOR), dan Persentase Laboratorium (%Lab).

Grafik 3.1. Indikator Akses yang Meluas (Rasio Pendidikan)



a. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)

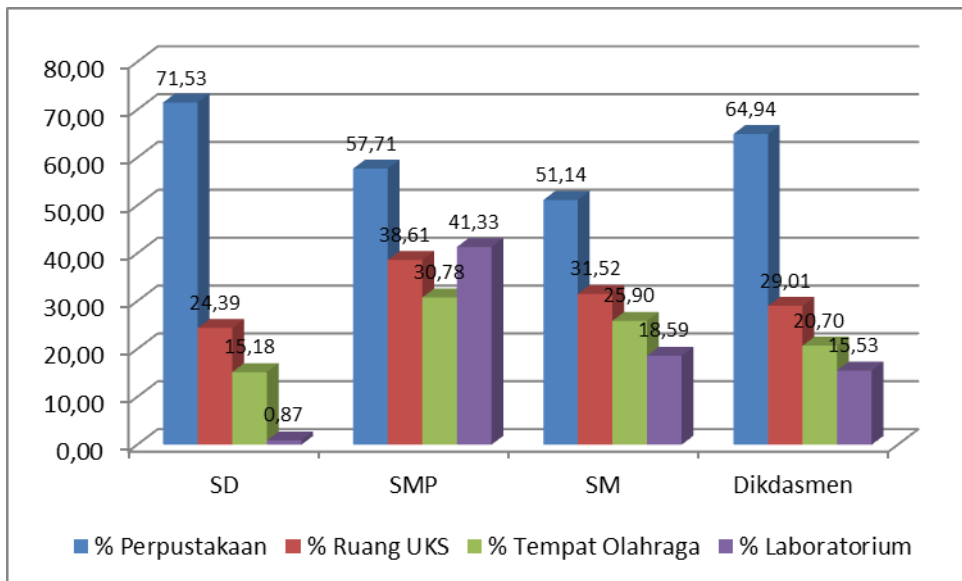
Untuk mengetahui pemerataan akses layanan pendidikan di Provinsi NTB bisa dilihat pada grafik 3.1. Dalam menguraikan arti dari indikator ini kita menggunakan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang diperbarui dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota mengatur besarnya jumlah siswa per kelas baik untuk satuan pendidikan SD maupun SMP serta Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prsarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta Permendiknas No. 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK. Berdasarkan SPM tersebut maka siswa di SD sebaiknya tidak melebihi 32 siswa/kelas, dan jumlah siswa di SMP sebaiknya tidak melebihi 36 siswa/kelas, siswa SM (SMA dan SMK) tidak

melebihi 36 siswa/kelas. Dari grafik 3.1 diketahui bahwa rata-rata siswa/kelas SD di Provinsi NTB sebesar 21, siswa/ kelas jenjang SMP sebesar 28 dan siswa/kelas jenjang SM sebesar 28. Hal ini berarti bahwa rasio siswa/kelas di semua jenjang sudah dibawah yang dipersyaratkan.

b. Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)

Dengan menggunakan asumsi bahwa Rasio K/RK adalah 1, maka terlihat bahwa untuk jenjang SD masih membutuhkan tambahan ruang kelas karena rasio K/RK masih lebih dari 1, Demikian juga untuk jenjang SMP dan SM. Hal ini berarti bahwa masih diperlukan pembangunan ruang kelas di semua jenjang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi NTB.

Grafik 3.2. Indikator Akses yang Meluas (Persentase Prasarana)



c. Persentase Perpustakaan (%Perpus)

Peranan perpustakaan di dalam pendidikan amatlah penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya dengan baik. Dengan adanya perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Pada grafik 3.2. terlihat bahwa belum semua sekolah di Provinsi NTB mempunyai

ruang perpustakaan. Di jenjang SD baru ada 71,53% sekolah yang memiliki ruang perpustakaan. Sesuai dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana bahwa setiap sekolah memiliki 1 ruang perpustakaan, yang berarti bahwa masih ada 38,47% sekolah di jenjang SD belum memiliki ruang perpustakaan. Untuk jenjang SMP 57,71% sekolah yang sudah memiliki ruang perpustakaan dan untuk jenjang SM ada 51,14% sekolah yang sudah memiliki ruang perpustakaan. Pembangunan perpustakaan perlu mendapat perhatian yang lebih bagi pemerintah Provinsi NTB karena perpustakaan merupakan sarana yang cukup penting dalam proses belajar bagi siswa.

d. Persentase Ruang UKS (%RUKS)

UKS dibentuk dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah dan menciptakan lingkungan yang sehat. Jumlah ruang UKS di Provinsi NTB dibandingkan dengan jumlah sekolah tidak memadai. Lebih dari setengah jumlah sekolah belum memiliki ruang UKS. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa seharusnya setiap sekolah memiliki ruang UKS. Dengan adanya UKS maka pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan pembinaan lingkungan Kehidupan sekolah sehat bisa terwujud.

e. Persentase Tempat Olahraga (%TOR)

Sarana olah raga adalah suatu bentuk permanen, baik itu ruangan di luar maupun di dalam ruangan. Fungsi sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam pengajaran olahraga. Manfaat sarana dan prasarana olahraga adalah dapat meningkatkan kualitas kesehatan dengan pemakaian alat dan

tempat olahraga dengan benar. Aktifitas olahraga di sekolah sangat penting bagi kesehatan para siswa. Akan tetapi di Provinsi NTB untuk semua jenjang pendidikan masih banyak sekolah yang belum memiliki tempat untuk berolahraga. Untuk itu perlu adanya penanganan kurangnya tempat olahraga bagi para siswa agar para siswa dapat meningkatkan aktifitas olahraga sehingga semakin selalu sehat.

f. Persentase Laboratorium (%Lab).

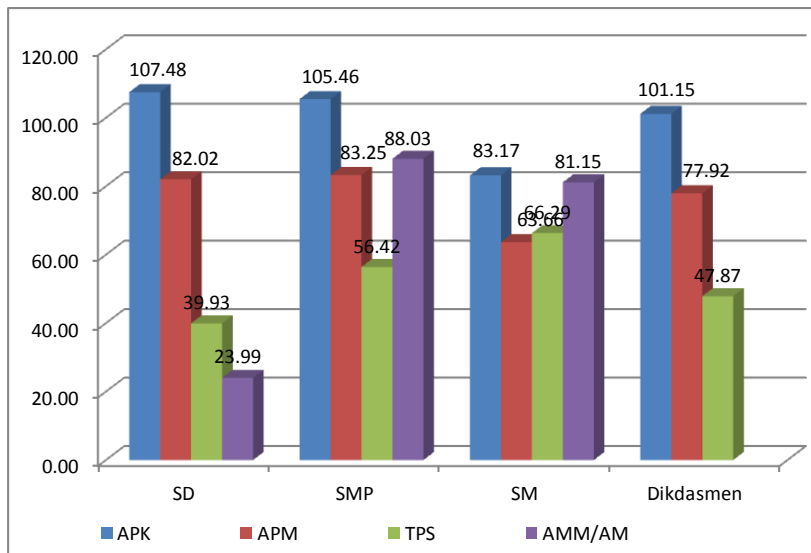
Laboratorium merupakan infrastruktur sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti bidang ilmu bahasa dan ilmu pengetahuan alam (fisika, biologi, dan kimia) maupun Ilmu pengetahuan sosial. Selain itu laboratorium juga merupakan sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi siswa. Di Provinsi NTB sarana laboratorium yang disediakan untuk sekolah belum memadai. Bahkan untuk jenjang SD belum ada 1% sekolah yang sudah memiliki laboratorium padahal di dalam Permendikbud No. 24 tahun 2007 disyaratkan bahwa SD/MI dan SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki 1 ruang laboratorium IPA. Untuk jenjang SMA diharapkan memiliki 5 ruang laboratorium yaitu ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, dan ruang laboratorium Bahasa. Kurangnya sarana ini seharusnya menjadi perhatian yang lebih bagi pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan kompetensi siswa.

3.2.2 Akses Merata

Indikator yang menyusun nilai kinerja pendidikan pada akses yang merata ada 5 indikator Angka Partisipasi Murni (APM) , Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS), Angka Masukan Murni (AMM

SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM), dan Satuan Biaya (SB). Akan tetapi dalam pembahasan ini indikator Satuan Biaya (SB) tidak diuraikan karena data tidak tersedia.

Grafik 3.3. Indikator Akses yang Merata (APK, APM, TPS dan AMM/AM)



a. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. IPM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM di Provinsi NTB pada semua jenjang masih jauh dari angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang sekolah di jenjang tersebut masih banyak yang tidak tepat waktu. Untuk jenjang SD dan SMP angka APM-nya sudah lebih dari 80% sedangkan untuk jenjang SM mencapai 63,66%.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Berdasarkan grafik 3.3 terlihat bahwa APK SD dan SMP di Provinsi NTB sudah lebih dari 100%. Hal ini berarti bahwa layanan pendidikan untuk jenjang SD di Provinsi NTB sudah baik. Untuk jenjang SMP angka APK-nya juga sudah lebih dari 100%. Pelayanan pendidikan untuk jenjang SM di Provinsi NTB kurang bagus karena APK-nya baru mencapai 83,17%. Dengan ini dapat dikatakan bahwa masih banyak anak usia sekolah untuk jenjang SM belum terlayani oleh pendidikan. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Provinsi NTB guna meningkatkan partisipasi untuk jenjang SM seiring dengan keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merintis Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada 2019 tercapai sejumlah target.

c. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia masuk sekolah atau lulusan dengan sekolah ekuivalen pada jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan grafik 3.3 terlihat bahwa nilai TPS untuk semua jenjang di Provinsi NTB dibawah angka nasional dimana angka nasional untuk SD adalah 53, untuk SMP 76 dan untuk jenjang SM 68. Hal ini berarti bahwa jumlah sekolah yang berada di Provinsi NTB sudah mencukupi untuk menampung penduduk usia sekolah dan lulusan yang ada di Provinsi NTB. Sekolah ekuivalen adalah sekolah yang memiliki 6 ruang kelas atau 6 rombongan belajar. Digunakan sekolah ekuivalen agar antara SD, SMP, dan SM bisa

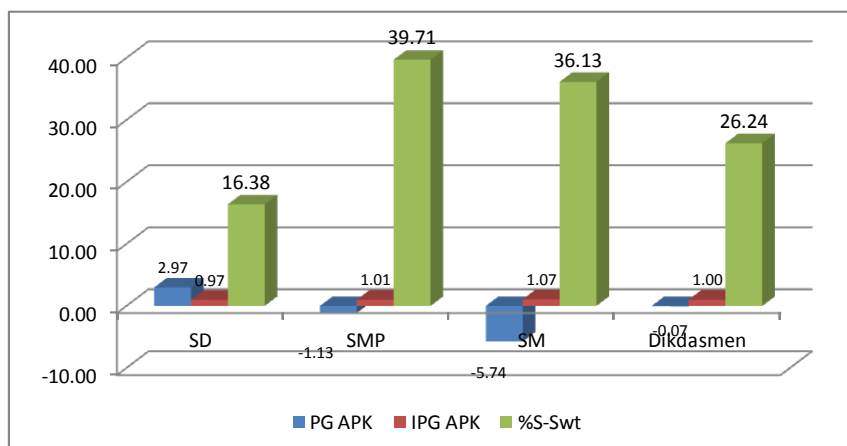
dibandingkan. Penduduk usia masuk sekolah digunakan untuk tingkat SD karena SD adalah melayani penduduk usia masuk sekolah (usia 6-7 tahun) sedangkan untuk tingkat SMP dan SM adalah melayani lulusan pada jenjang yang lebih rendah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

- d. Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM). Usia resmi masuk SD adalah 7 tahun. Demikian pula dari berbagai studi perkembangan anak, maka usia 7 tahun adalah usia yang paling tepat untuk anak pada umumnya masuk ke Sekolah Dasar. Anak yang terlalu dini masuk SD masih bermasalah khususnya di kelas satu, karena ia belum siap untuk belajar berkonsentrasi, karena ia masih sedang mengembangkan keterampilan geraknya. Akibatnya dia akan sulit berkonsentrasi, meskipun secara kemampuan intelektualnya dia sudah cukup mampu menyelesaikan soal-soal yang disediakan. AMM SD untuk Provinsi NTB sebesar 23,99% yang berarti masih banyak anak-anak yang masuk SD pada usia yang tidak tepat. Angka melanjutkan SD ke SMP mencapai 88,03 dan angka melanjutkan SMP ke SM sebesar 81,15. Terlihat bahwa angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dasar ke menengah masih berada dibawah 90.

3.2.3 Akses Berkeadilan

Indikator pendukung untuk menyusun kinerja akses yang berkeadilan adalah Perbedaan Gender APK (PG APK), Indeks Paritas Gender APK (IPG APK) dan % Siswa Swasta (% S-Swt)

Grafik 3.4. Indikator Akses Yang Berkeadilan (PG APK, IPG APK dan %S-Swt)



a. Perbedaan Gender APK (PG APK)

Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Terjadinya perbedaan gender pada APK bisa terjadi karena budaya di lingkungan atau karena akses pendidikan yang masih sulit dijangkau. Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki sekolah tingkat SMP dan seterusnya hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan keamanan mereka. Berdasarkan data di grafik 3.3 terlihat bahwa untuk jenjang SD partisipasi anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan. Hal ini berlawanan dengan jenjang SMP dan SM dimana partisipasi anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki.

b. Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)

IPG APK digunakan untuk mengetahui apakah sudah terjadi keseimbangan bersekolah antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dalam sektor pendidikan. Searah dengan perbedaan gender maka masih terjadi ketimpangan antara APK laki-laki dan perempuan di Provinsi NTB dimana jenjang SD bernilai positif yang berarti partisipasi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan sedangkan di jenjang SMP dan SM bernilai negatif yang berarti partisipasi anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki.

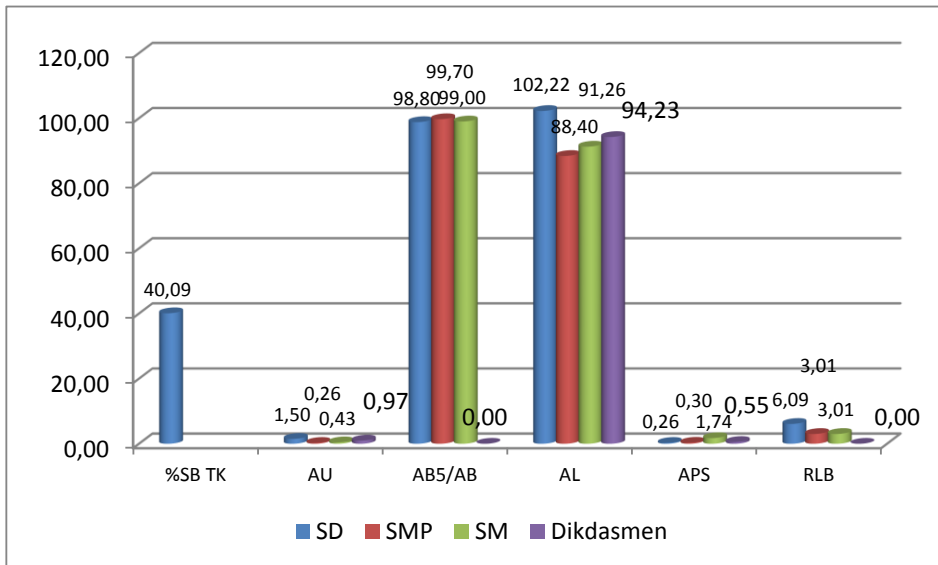
c. % Siswa Swasta (% S-Swt)

Dalam meningkatkan kinerja pendidikan membutuhkan peran masyarakat umum. Indikator % Siswa Swasta (% S-Swt) menunjukkan seberapa besar partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa di sekolah. % S-Swt di Provinsi NTB sudah cukup menggembirakan dimana untuk jenjang SD mencapai 16,38%, jenjang SMP mencapai 39,71% dan SM mencapai 36,13%.

3.2.4 Mutu Siswa

Ada 6 indikator yang menyusun indikator mutu siswa yaitu Persentase Siswa Baru PAUD/TK/RA/BA (%SB TK), Angka Mengulang (AU), Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM), Angka Lulusan (AL), Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Belajar (RLB)

Grafik 3.5. Indikator Mutu Siswa



a. Persentase Siswa Baru TK (%SB TK)

Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan yang diperoleh pada usia emas (1-5 tahun) sangat mempengaruhi perkembangan dan prestasi anak ketika dewasa. Dengan mengikuti pendidikan di PAUD/TK/RA/BA maka diharapkan siswa memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Siswa baru SD di Provinsi NTB baru 49,69% yang menempuh pendidikan di PAUD/TK/RA/BA. Dalam rangka mendukung gerakan nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas sebagaimana dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 19 maret 2015 lalu, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai merintis program wajib PAUD satu tahun sebelum memasuki SD di 70 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas 90 persen. Sebelumnya pemerintah sudah membuat gerakan program satu desa satu PAUD untuk mencapai target penyediaan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Program ini

dicanangkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang di beberapa daerah di Indonesia masih di bawah rata-rata nasional. Dengan ini berarti pemerintah Provinsi NTB masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi siswa PAUD sehingga semakin banyak siswa baru yang masuk SD sudah pernah mengikuti PAUD minimal satu tahun.

b. Angka Mengulang (AU)

Siswa mengulang kelas merupakan suatu pemborosan, baik dari segi pendidikan maupun dari segi ekonomi karena akan mengurangi kapasitas masuk sekolah bagi anak lain, menurunkan tingkat efisiensi internal (*input-output ratio*), dan menaikkan biaya pendidikan bagi pemerintah. Angka mengulang untuk semua jenjang di Prov. NTB sudah cukup rendah. Akan tetapi untuk jenjang SD walaupun sudah rendah masih perlu diperhatikan karena masih di atas 1%.

c. Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM)

Berdasarkan grafik 3.4 terlihat bahwa angka bertahan untuk jenjang SD sebesar 98,80. Hal ini berarti bahwa masih ada anak yang mengulang atau putus sekolah di jenjang SD sehingga angka bertahan belum mencapai 100%. Seperti halnya jenjang SD, untuk jenjang SMP dan SM angka bertahan juga belum mencapai 100%. Akan tetapi sudah cukup baik karena mencapai lebih dari 99% bahkan untuk jenjang SMP mencapai 99,70%.

d. Angka Lulusan (AL)

Angka lulusan di Provinsi NTB untuk jenjang SM sudah cukup baik. Persentase kelulusan untuk SD mencapai lebih dari 100% yang berarti ada beberapa lulusan yang berasal dari paket A. Angka lulusan untuk jenjang SMP masih perlu ditingkatkan mengingat angka lulusannya masih bernilai dibawah 90%.

e. Angka Putus Sekolah (APS)

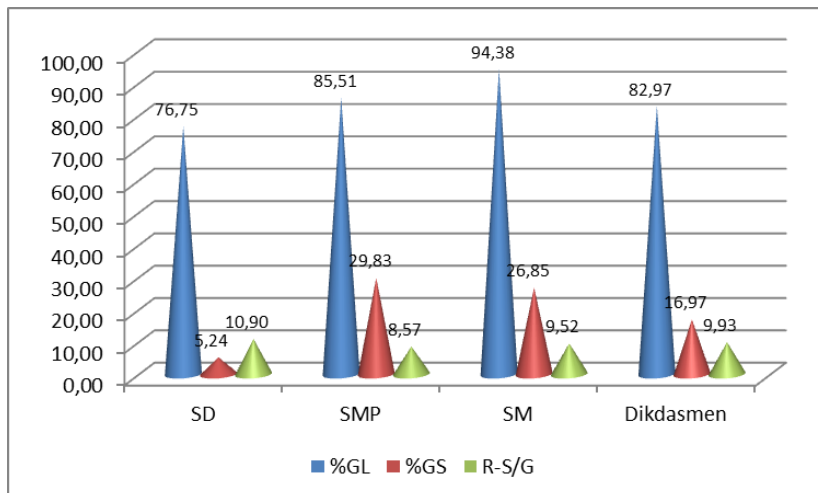
Putus sekolah memberi dampak pada hilangnya sumber daya manusia yang potensial yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kurangnya efisiensi sistem pendidikan masyarakat. Angka putus sekolah di Provinsi NTB di jenjang SD dan SMP sudah cukup rendah. Akan tetapi untuk jenjang SM masih cukup besar karena masih diatas 1%. Oleh karena itu hendaknya perlu dicermati mengapa masih banyak anak putus sekolah di jenjang SM sehingga efisiensi pendidikan bisa meningkat dan sumber daya manusia di Provinsi NTB bisa ditingkatkan seiring dengan dicanangkannya program Wajar 12 tahun.

f. Rata-rata Lama Belajar (RLB)

Rata-rata lama belajar merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi internal dimana jika sistem pendidikan memiliki efisiensi internal yang tinggi maka menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Rata-rata lama belajar di Provinsi NTB sudah cukup baik karena untuk jenjang SD sebesar 6,09 tahun, jenjang SMP sebesar 3.01 tahun dan jenjang SM sebesar 3,01 tahun. Untuk jenjang SD rata-rata lama belajar masih perlu diperbaiki dengan meminimalkan siswa mengulang sehingga efisiensi internal bisa ditingkatkan dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa diminimalkan.

3.2.5 Mutu Guru

Grafik 3.6. Indikator Mutu Guru



Indikator pendukung untuk menyusun kinerja mutu guru ada 3 indikator yaitu %Guru Layak (%GL), % Guru sertifikasi (%GS) dan Rasio Siswa per Guru (R-S/G).

a. % Guru Layak (%GL)

Berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi sedangkan untuk jenjang SMP dan SM harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pada analisis ini hanya digunakan kualifikasi pendidikan saja belum pada analisis kesesuaian antara program studi dan mata pelajaran yang diampu oleh guru. Di Provinsi

NTB kelayakan guru belum cukup baik karena masih dibawah 90%. Untuk jenjang SD dan SM baru mencapai 77,25% dan 77,45%, sedangkan untuk jenjang SMP mencapai 81,35%. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kompetensi guru di Provinsi NTB baik melalui pelatihan, Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS), mengikuti kursus, menambah pengetahuan melalui media masa atau elektronik maupun menempuh pendidikan di lembaga pendidikan.

b. % Guru sertifikasi (%GS)

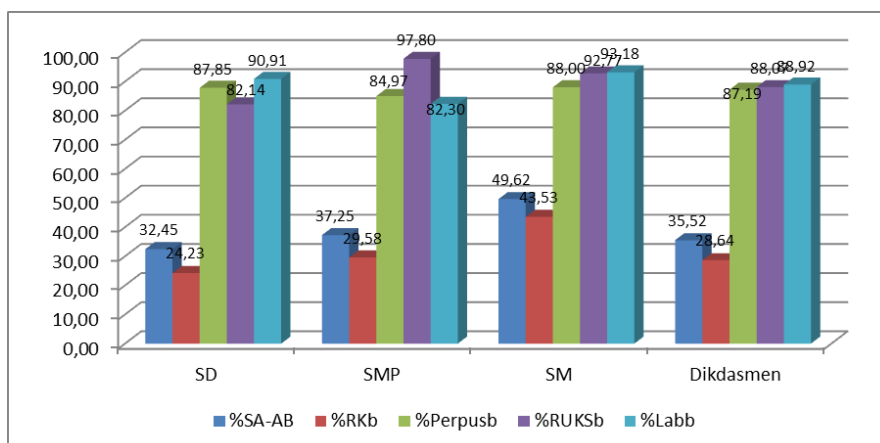
Tujuan diadakannya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kompetensi atau kualitas guru yang pada akhirnya diharapkan meningkatnya mutu pendidikan. Berdasarkan grafik 3.5 terlihat bahwa guru jenjang SD di Provinsi NTB yang sudah bersertifikasi baru mencapai 50,15%. Lebih memprihatinkan lagi untuk jenjang SMP baru mencapai 40,33% dan jenjang SM 39,76%.

c. Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Rasio S/G di Provinsi NTB untuk jenjang SD sebesar 13, jenjang SMP sebesar 11 dan untuk jenjang SM sebesar 12. Angka ini sudah dibawah angka nasional dimana angka nasional untuk jenjang SD sebesar 16, jenjang SMP 15 dan jenjang SM 12. Hal ini berarti jumlah guru di Provinsi NTB sudah cukup secara global sudah mencukupi tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemerataannya antar wilayah kabupaten/kota maupun antar kecamatan.

3.2.6 Mutu Prasarana

Grafik 3.7. Indikator Mutu Prasarana



Indikator untuk menghitung kinerja pendidikan dari sisi mutu prasarana pendidikan ada 5 indikator yaitu Persentase Sekolah Akreditasi A&B (%SA-B), Persentase Ruang Kelas baik (%RKb), Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb), Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb), Persentase Laboratorium baik (%Labb). Prasarana pendidikan sangat mendukung untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dukungan prasarana pendidikan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan.

a. Persentase Sekolah Akreditasi A&B (%SA-B)

Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Dengan adanya hasil akreditasi dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan penyelenggara sekolah guna kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sekolah di Provinsi NTB sebagian besar belum berakreditasi A atau B. Berdasarkan grafik 3.6 terlihat bahwa untuk jenjang sekolah dasar hanya 32,45% sekolah yang berakreditasi A atau B. Demikian juga dengan

jenjang SMP dan SM. Untuk jenjang SMP hanya 37,25% sekolah yang berakreditasi A atau B sedangkan untuk jenjang SM sebesar 49,62%. Peningkatan kreditasi sekolah di Provinsi NTB sangat diperlukan supaya mutu sekolah yang ada di Provinsi NTB semakin meningkat.

b. Persentase Ruang Kelas baik (%RKb)

Kondisi ruang kelas akan mendukung dalam proses belajar mengajar. Kondisi ruang kelas yang ada di sekolah-sekolah di lingkungan Provinsi NTB sebagian besar dalam kondisi rusak. Perlu perhatian yang lebih guna merehabilitasi ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak.

c. Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb)

Perpustakaan sekolah yang ada di Provinsi NTB sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi secara nominal, jumlah perpustakaan belum seimbang dengan jumlah sekolah yang ada.

d. Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb)

Jumlah UKS belum seimbang dengan jumlah sekolah, tetapi dari UKS yang ada sebagian besar dalam kondisi baik.

e. Persentase Laboratorium baik (%Labbb)

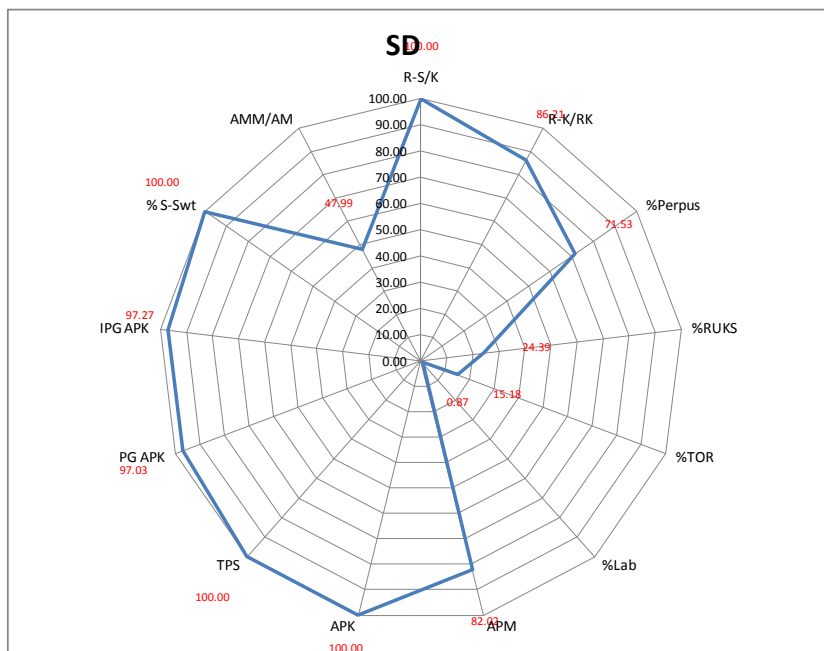
Walaupun jumlah laboratorium belum mencukupi, tetapi kondisi laboratorium di Provinsi NTB sebagian besar dalam kondisi baik

3.3. Nilai Indikator Pendidikan

Nilai Indikator Pendidikan akan diuraikan berdasarkan indikator misi akses dan mutu serta berdasarkan jenjang pendidikan.

3.3.1. Nilai Indikator Jenjang SD Berdasarkan Misi Akses

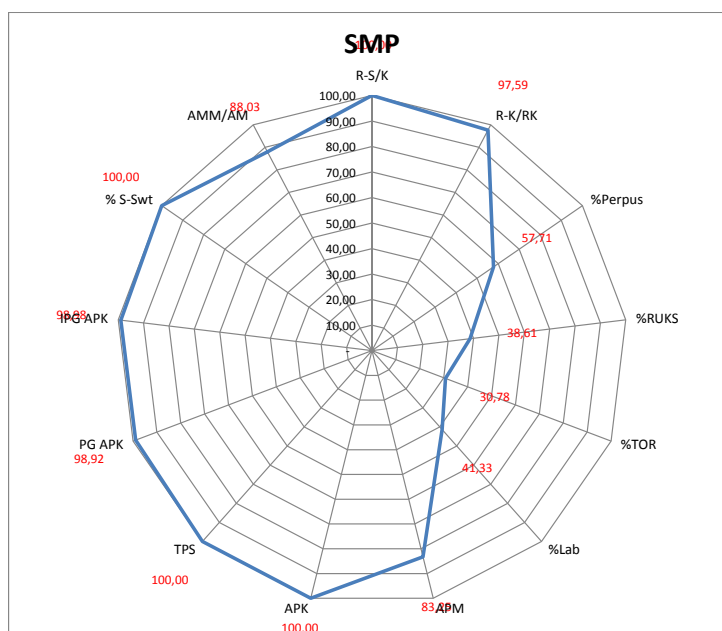
Grafik 3.8. Indikator Jenjang SD Berdasarkan Misi Akses



Dari grafik 3.7 terlihat bahwa indikator %TOR, %RUKS, %Perpus, %Lab dan AMM/AM di jenjang SD perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Kelima indikator tersebut bernilai sangat kecil terutama %TOR, %Lab dan %RUKS. Terlihat bahwa indikator misi akses jenjang SD dari sisi prasarana di Provinsi NTB masih rendah.

3.3.2. Nilai Indikator Jenjang SMP Berdasarkan Misi Akses

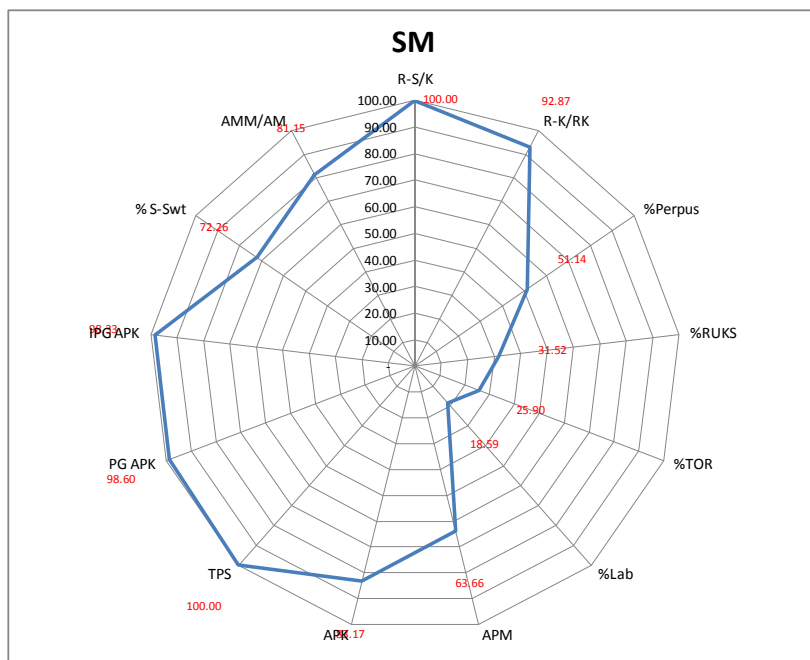
Grafik 3.9. Indikator Jenjang SMP Berdasarkan Misi Akses



Untuk jenjang SMP indikator misi akses yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah indikator %TOR, %RUKS, %Perpus, dan %Lab. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

3.3.3. Nilai Indikator Jenjang SM Berdasarkan Misi Akses

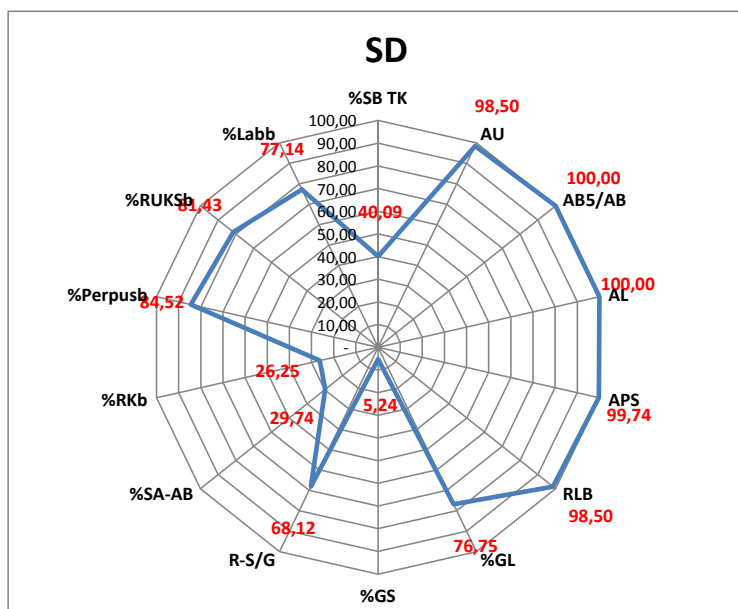
Grafik 3.10. Indikator Jenjang SM Berdasarkan Misi Akses



Untuk jenjang pendidikan SM, beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian adalah APK, APM, %TOR, %UKS, %Perpus dan %Lab. Nilai APK dan APM-nya masih cukup rendah sehingga terlihat masih banyak anak usia SM yang tidak bersekolah. Untuk prasarana sekolah juga masih perlu ditingkatkan karena masih banyak yang belum mempunyai prasarana seperti UKS, laboratorium, perpustakaan dan tempat olahraga.

3.3.4. Nilai Indikator Jenjang SD Berdasarkan Misi Mutu

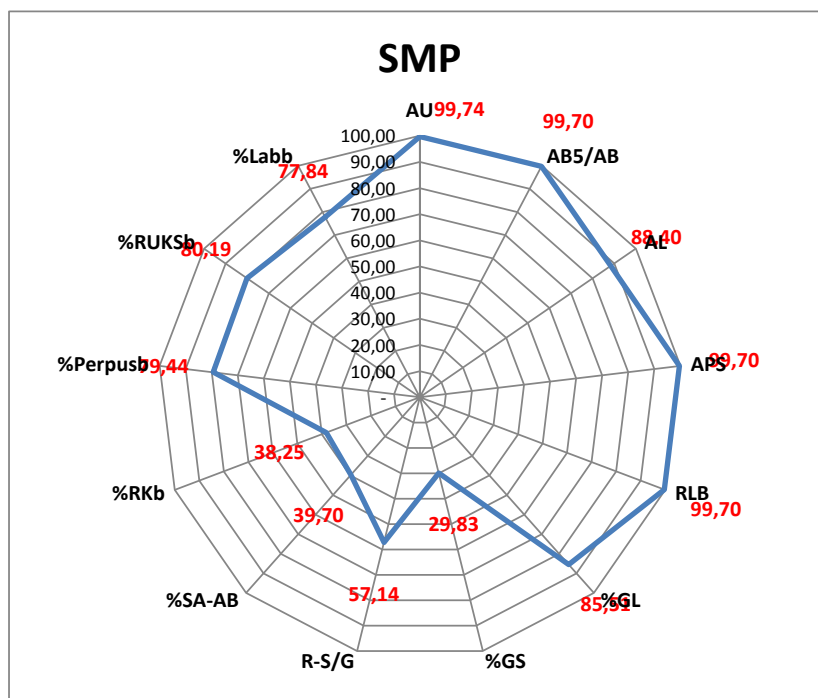
Grafik 3.11. Indikator Jenjang SD Berdasarkan Misi Mutu



Berdasarkan grafik 3.10 terlihat bahwa untuk indikator misi mutu pendidikan yang perlu diperhatikan adalah %Rkb, %SA-B, R-S/G, %GS, dan %SB-TK. Nilai %Rkb sangat kecil sehingga perlu penanganan yang lebih utama. Kondisi ruang kelas sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Apalagi jika kondisi ruang kelas sudah dalam kondisi rusak berat. Hal ini bisa membahayakan keselamatan siswa dan guru. Akreditasi sekolah juga perlu ditingkatkan karena sekolah yang berakreditasi A dan B masih sedikit. Persentase guru yang sudah bersertifikasipun masih rendah. Pelatihan guru perlu ditingkatkan untuk menunjang profesionalisme guru. Siswa baru SD yang merupakan tamatan dari PAUD/TK/RA/BA masih belum banyak. Selain itu banyak siswa baru SD yang usianya tidak sesuai dengan usia resmi yaitu 6-7 tahun. R-S/G juga rendah karena jumlah guru yang sudah cukup banyak.

3.3.4. Nilai Indikator Jenjang SMP Berdasarkan Misi Mutu

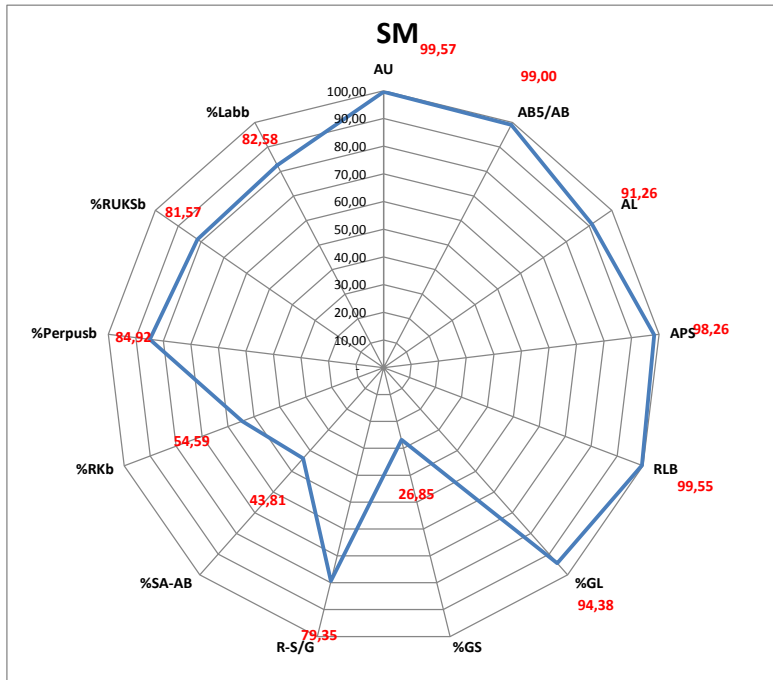
Grafik 3.12. Indikator Jenjang SMP Berdasarkan Misi Mutu



Pada Indikator Misi Mutu untuk jenjang SMP, beberapa indikator yang nilainya cukup rendah adalah %Rkb, %SA-AB, R-S/G dan %GS. Seperti pada jenjang SD, prasarana ruang kelas yang dalam kondisi baik masih sedikit. Ketika dilihat dari data menurut kondisi, sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak ringan. Peningkatan akreditasi sekolah pada jenjang SMP masih sangat diperlukan. Selain itu persentase guru yang bersertifikasi juga diperlukan guna meningkatkan mutu pendidikan jenjang SMP. Rasio siswa per guru cukup kecil karena jumlah guru melebihi tetapi belum merata. Kelengkapan dan kondisi prasarana mempengaruhi nilai akreditasi sekolah.

3.3.4. Nilai Indikator Jenjang SM Berdasarkan Misi Mutu

Grafik 3.11. Indikator Jenjang SM Berdasarkan Misi Mutu



Seperti halnya jenjang SD dan SMP, indikator mutu yang bernilai rendah untuk jenjang SM adalah %Rkb, %SA-AB, dan %GS. Upaya-upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di jenjang SM juga diperlukan seperti halnya jenjang lain seiring dengan keinginan pemerintah untuk melaksanakan Wajar 12 tahun.

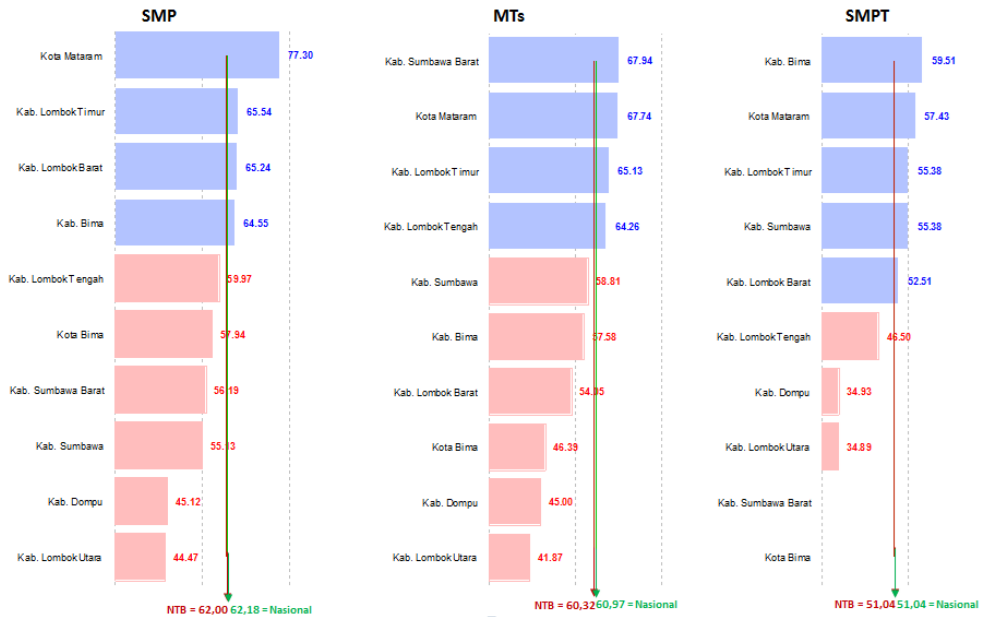
3.4. Nilai Ujian Nasional Tahun Ajaran 2014/2015

Peta 3.1. Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMP, MTs dan SMPT



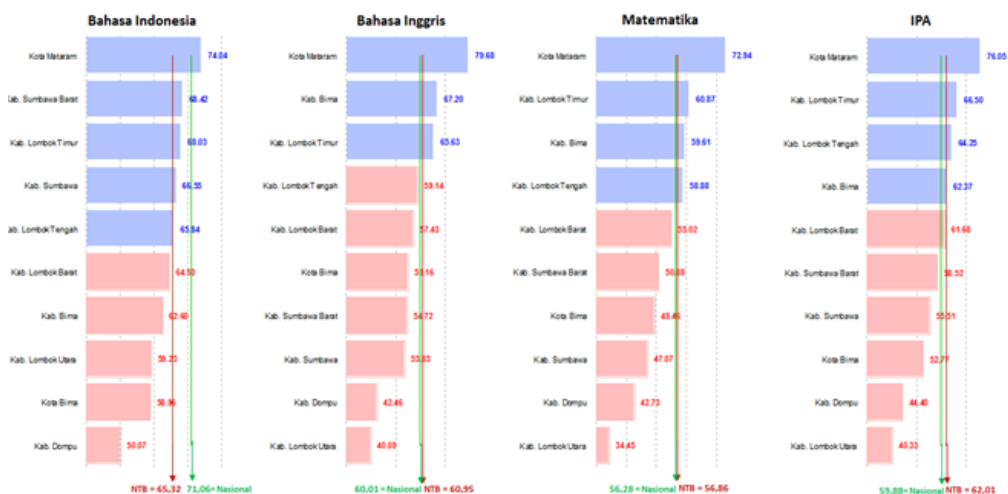
Berdasarkan peta 3.1 terlihat bahwa ada 2 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai nilai rata-rata antara < 46.00 untuk jenjang SMP/MTs/SMPT. Kedua Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lombok Utara dan Kab. Dompu. Selain itu hanya Kota Mataram yang memiliki rata-rata nilai UN > 66.00 sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya mempunyai nilai rata-rata antara 46.00-66.00.

Grafik 3.14 Rata – rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMP, MTs dan SMPT



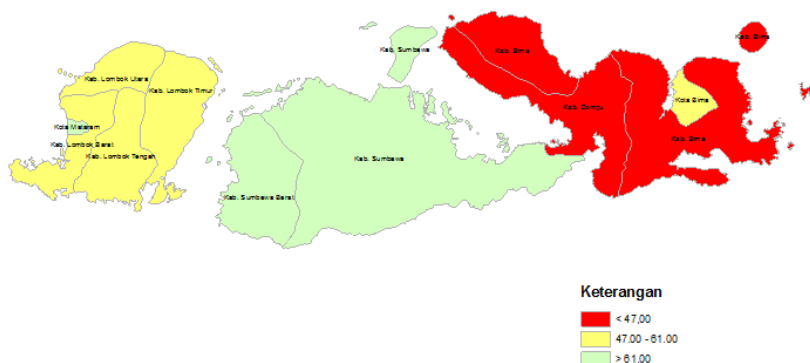
Ada beberapa kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata nilai ujian nasional jenjang SMP, MTs dan SMPT diatas nilai rata-rata nasional. Untuk jenjang SMP kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Kota Mataram bahkan memiliki nilai rata-rata mencapai 77.30.

Grafik 3.15 Rata – Rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMP, MTs dan SMPT Per Mata Pelajaran



Pada pelajaran Bahasa Indonesia, hanya Kota Mataram yang memiliki nilai rata-rata lebih dari nilai rata-rata nasional, sedangkan yang lebih dari nilai rata-rata provinsi ada 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kab. Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kab. Lombok Tengah. Pada pelajaran Bahasa Inggris ada 3 kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional yaitu Kota Mataram, Kab. Bima dan Kab. Lombok Timur. Untuk mata pelajaran Matematika dan IPA ada 4 kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional yaitu Kota Mataram, Kab. Bima, Lombok Tengah dan Kab. Lombok Timur. Jadi secara umum masih banyak kabupaten/kota di Provinsi Mataram yang memiliki rata-rata nilai ujian nasional pada jenjang SMP, MTs dan SMPT di bawah nilai rata-rata nasional bahkan dibawah nilai rata-rata provinsi.

Peta 3.2 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPA



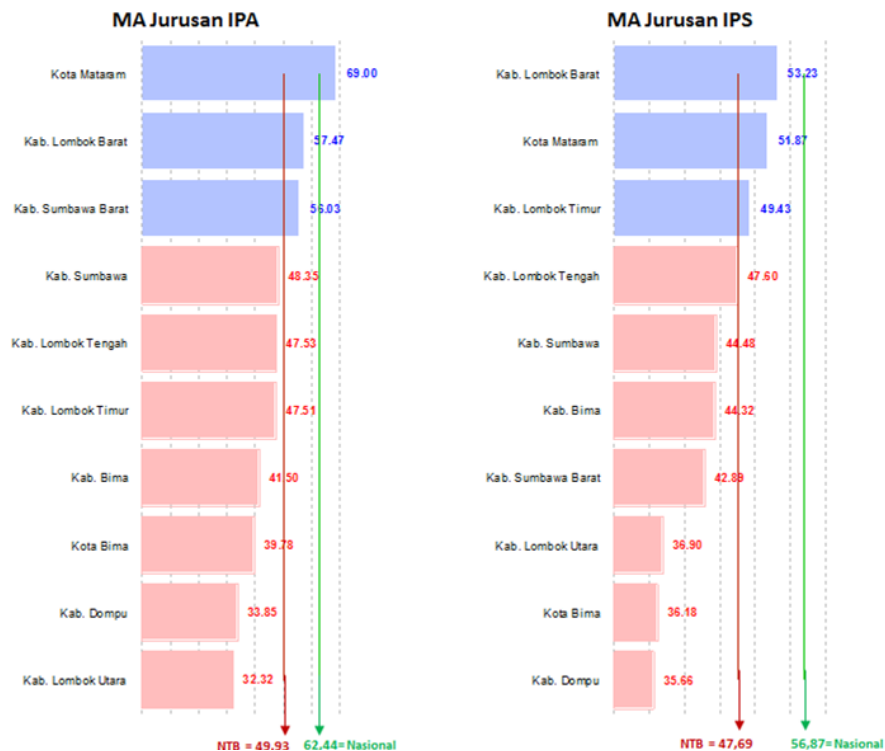
Rata-rata nilai ujian nasional kabupaten/kota jenjang SMA jurusan IPA di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup bagus. Ada 3 kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas 61,00 yaitu Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Ada 2 kabupaten yang memiliki nilai rata-rata dibawah 47.00 yaitu Kab. Bima dan Kab. Dompu. Jadi ada 5 kabupaten/kota yang memiliki nilai tengah yaitu Kota Bima, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah.

Berdasarkan Peta 3.3 diketahui bahwa untuk jenjang SMA jurusan IPS, ada 4 kabupaten yang memiliki nilai rata-rata nilai diatas 48,00 yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur dan Kab. Sumbawa Barat. Kota Bima dan Kab. Dompu memiliki nilai rata-rata kurang dari 35.00.

Peta 3.3 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPS

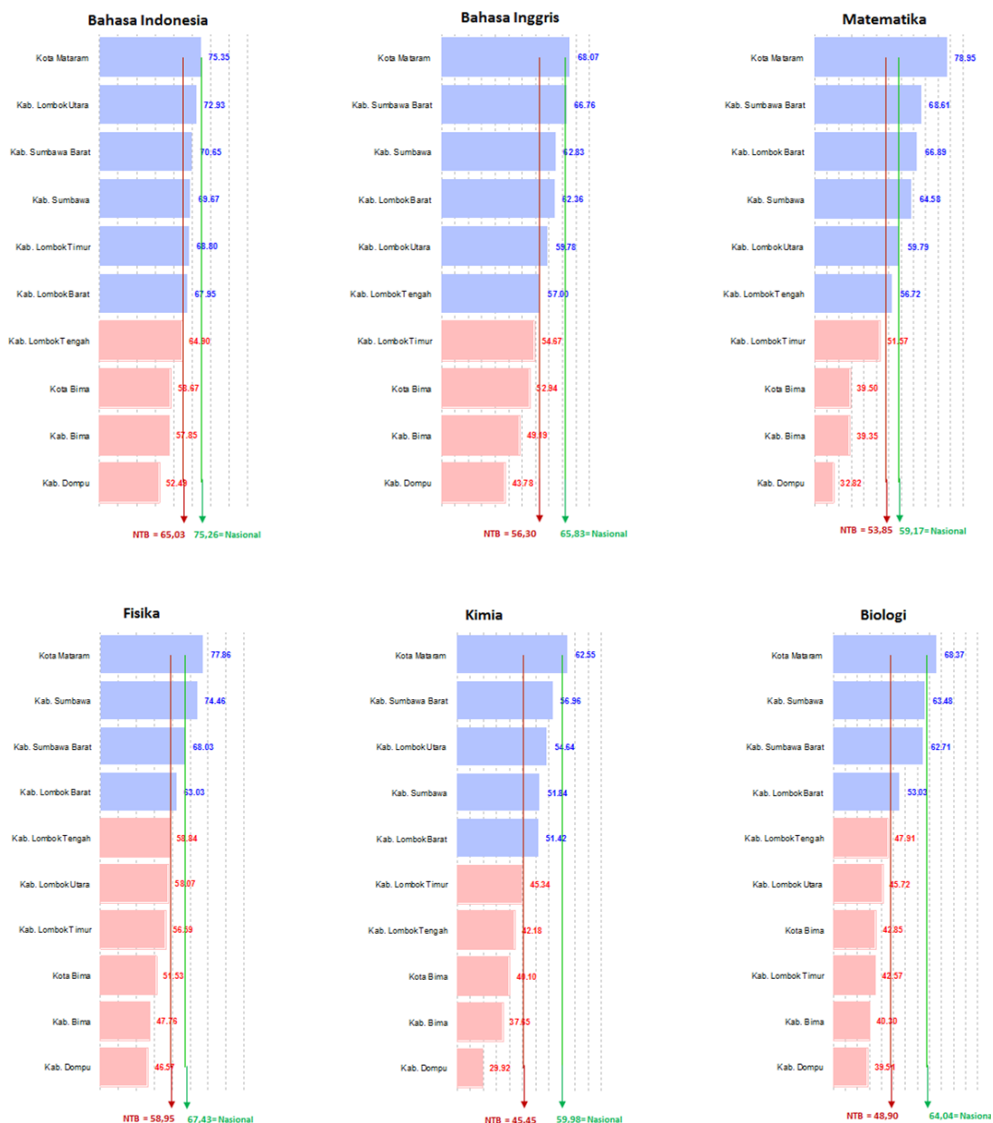


Grafik 3.16 Rata – Rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPA dan IPS



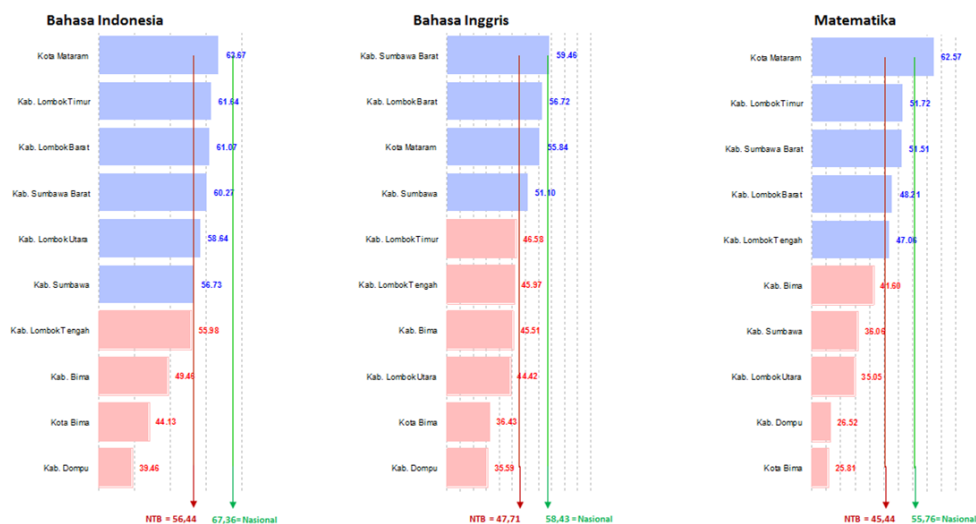
Masih banyak kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jurusan IPA yang memiliki nilai rata-rata masih dibawah nilai rata-rata nasional. Hanya Kota Mataram yang memiliki rata-rata nilai UN jurusan IPA berada diatas nilai rata-rata nasional. Akan tetapi untuk jurusan IPS tidak satupun nilai rata-rata UN-nya berada diatas nilai rata-rata nasional. Rata-rata nilai ujian nasional jenjang SMA untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada dibawah nilai rata-rata nasional. Baik untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS semuanya berada dibawah nilai rata-rata nasional. Demikian juga untuk nilai rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semuanya berada dibawah nilai rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata provinsi, ada tiga kabupaten/kota yang mempunyai nilai rata-rata di atas nilai rata-rata provinsi untuk jurusan IPA. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Ada tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata kabupaten/kota lebih dari nilai rata-rata provinsi. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kab. Lombok Timur.

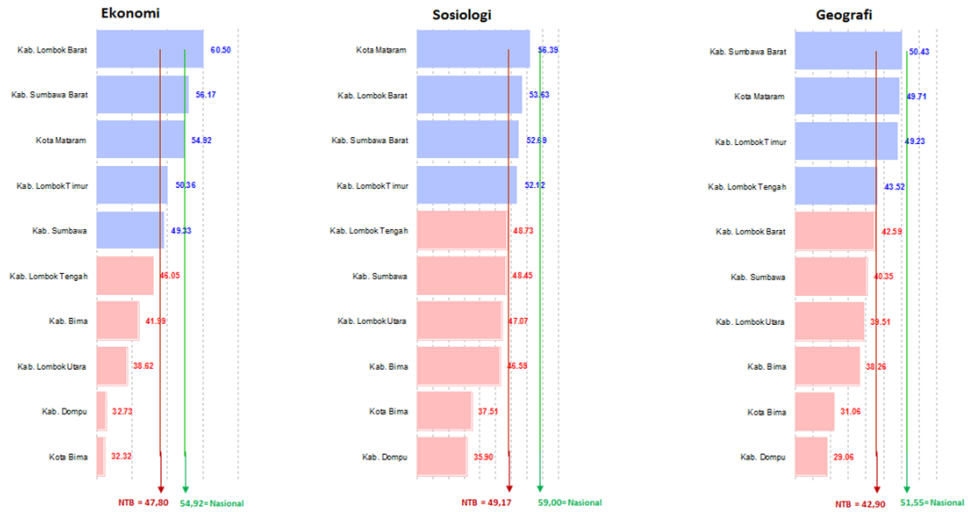
Grafik 3.17 Rata – Rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPA Per Mata Pelajaran



Untuk jenjang SMA jurusan IPA, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya Kota Mataram yang memiliki nilai rata-rata nilai UN diatas nilai rata-rata nasional. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional. Untuk mata pelajaran Matematika, ada 5 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada nilai rata-rata nasional yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Barat Lombok Utara dan Lombok Tengah. Pada mata pelajaran Fisika ada 3 kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional yaitu Kota Mataram, Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat. Sedangkan pada mata pelajaran Kimia dan Biologi hanya Kota Mataram yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional.

Grafik 3.18 Rata – Rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMA Jurusan IPS Per Mata Pelajaran.





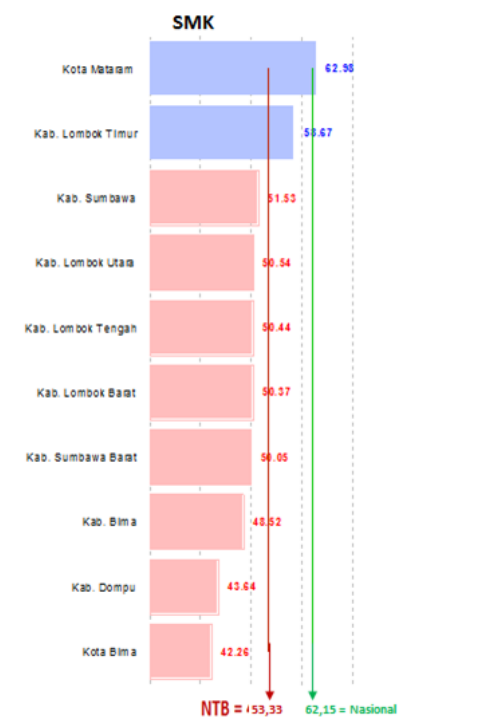
Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sosiologi dan Geografi yang diujikan pada jenjang SMA jurusan IPS tidak ada satupun kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional. Pada mata pelajaran Bahasa Inggris Kab. Sumbawa Barat memiliki nilai rata-rata sedikit diatas nilai rata-rata nasional. Pada mata pelajaran Matematika Kota Mataram memiliki nilai rata-rata lebih dari nilai rata-rata nasional sedangkan pada mata pelajaran Ekonomi Kab. Lombok Barat memiliki nilai rata-rata lebih dari nilai rata-rata nasional.

Peta 3.4 Rata-rata Nilai Ujian Nasional Provinsi NTB Jenjang SMK



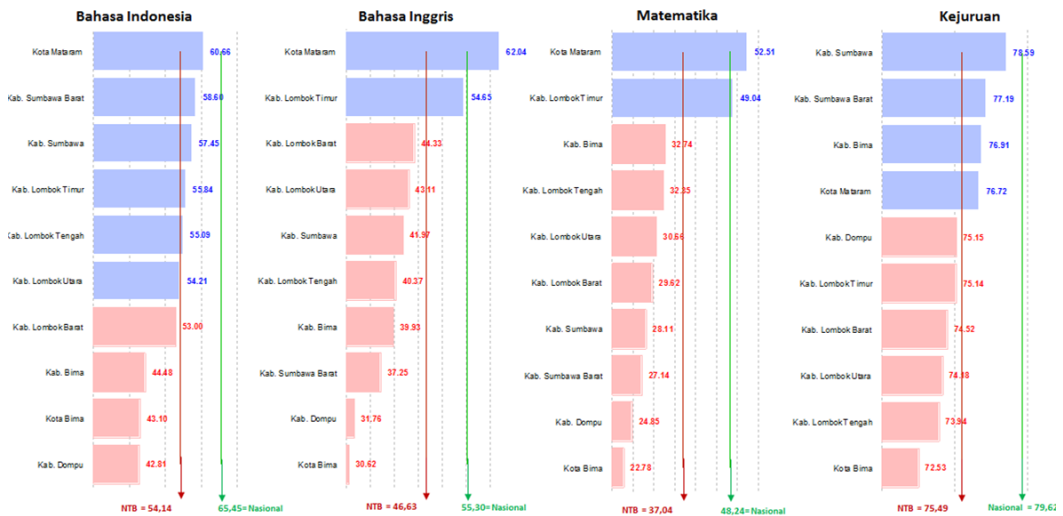
Bila dilihat dari peta 3.4, dapat dilihat bahwa hanya Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram yang memiliki nilai rata-rata diatas 52.00. Kota Bima dan Kabupaten Dompu memiliki nilai bawah karena nilai rata-ratanya dibawah 44.00. Kabupaten yang memiliki nilai rata-rata di posisi tengah adalah Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa dan Kab. Bima.

Grafik 3.19 Rata – Rata Nilai Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Jenjang SMK



Nilai rata-rata nasional ujian nasional di jenjang SMK sebesar 62,15. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya Kota Mataram yang memiliki nilai rata-rata sedikit diatas nilai rata-rata nasional.

Grafik 3.20. Rata – Rata Nilai Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jenjang SMK Per Mata Pelajaran



Bila dilihat per mata pelajaran maka untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak ada satupun kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris hanya Kota Mataram yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional. Untuk mata pelajaran Matematika, Kota Mataram dan Kab. Lombok Timur memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional.

BAB IV. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan analisis indikator dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. IPM tahun 2015 : 65.19 dimana nilai tertinggi adalah Kota Mataram dengan nilai 76,37
- b. Rata-rata lama sekolah tahun 2015 mencapai angka 6,71 yang artinya mencapai kelas 6 SD.
- c. Misi Akses jenjang SD, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %TOR, %RUKS, %Perpus, %Lab dan AMM/AM.
- d. Misi Akses jenjang SMP, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %TOR, %RUKS, %Perpus, dan %Lab.
- e. Misi Akses jenjang SM, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %S-Swt, APK, APM, %R-UKS, dan %Lab.
- f. Misi Mutu jenjang SD, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %Rkb, %SA-B, R-S/G, %GS, dan %SB-TK
- g. Misi Mutu jenjang SMP, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %Rkb, %SA-B, R-S/G dan %GS
- h. Misi Mutu jenjang SM, indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah %Rkb, %SA-B, R-S/G dan %GS.
- i. Pada jenjang SMP, MTs dan SMPT ada empat kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata diatas nilai rata-rata nasional yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Kota Mataram bahkan memiliki nilai rata-rata mencapai 77.30
- j. Untuk jenjang SMA jurusan IPA hanya Kota Mataram yang memiliki rata-rata nilai UN diatas nilai rata-rata nasional. Untuk jurusan IPS tidak ada satupun kabupaten/kota yang memiliki rata-rata nilai UN-nya berada diatas nilai rata-rata nasional. Untuk jenjang SMK, hanya Kota Mataram yang memiliki rata-rata nilai UN sedikit diatas nilai rata-rata nasional.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka untuk meningkatkan kinerja pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Perlu pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang.
- b. Perlu rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar.
- c. Perlu pembangunan PAUD dan advokasi tentang PAUD agar banyak siswa yang masuk SD merupakan tamatan PAUD/TA/RA/BA.
- d. Perlu peningkatan APK dan APM jenjang SM dengan membangun sekolah jauh supaya akses untuk sekolah menengah menjadi mudah bagi daerah-daerah yang belum terlayani sekolah menengah serta memberikan BOS daerah (selain BOS pemerintah pusat). Dengan adanya BOS sampai pendidikan SM maka program wajib belajar 12 tahun bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada alasan bagi siswa tidak mampu untuk tidak sekolah.
- e. Perlu peningkatan kelayakan dan kualifikasi guru di jenjang SD, SMP dan SM dengan dilakukan banyak pelatihan guru dan memberikan beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- f. Perbaiki sarana transportasi

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2016. Indeks Pembangunan Manusia, Jakarta.
- BPS, UNPF, 2015, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jakarta
- BPS, 2014. Statistik Pendidikan, Jakarta.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kota Mataram.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kota Bima.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Lombok Barat
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Lombok Timur
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Lombok Tengah.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Lombok Utara,
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Sumbawa.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Sumbawa Barat.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Bima.
- Isian Instrumen Profil Pendidikan 2015 Kabupaten Dompu.
- Ida Kintamani, 2013. Indikator Misi Pendidikan 5K Berdasarkan Rencana Strategis Pendidikan 2010-2014. Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Indonesia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019*, Jakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, *APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM (termasuk Madrasah dan sederajat) Tahun 2014/2015*, Jakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM (termasuk Madrasah dan sederajat) Tahun 2015/2016*, Jakarta